

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekuasaan (*power*) dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pendorinasian praktik individu atau kelompok dalam satu golongan. Sehingga, kekuasaan dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku bahkan tindakan perorangan atau perkelompokan dalam menyikapi persoalan yang ada.

Konsep kekuasaan dapat ditemukan dalam suatu praktik pemerintahan negara. Pemerintahan dijadikan oleh suatu negara sebagai sistem yang mengatur pengelolaan keseimbangan bermasyarakat dan bertindak terhadap suatu permasalahan secara menyeluruh (lihat Labolo, 2014). Sehingga, pernyataan sikap (pemimpin pemerintahan) memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan (kebijakan) yang bisa menyebabkan suatu tindakan (perbaikan masalah sistem) dalam masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan dalam mengontrol tindakan bahkan sikap dari mitra (lawan tutur).

Pada dasarnya, kekuasaan sering dimunculkan oleh seorang pemimpin kenegaraan dalam dunia perpolitikan (lihat Fairclough, 2001). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penonjolan dan pengakuan diri terhadap kekuatan (kekuasaan) yang dimilikinya. Sehingga, berbagai bentuk dan cara tindakan akan dilakukan untuk menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan terhadap suatu permasalahan melalui bahasa. Untuk itu, bahasa (tuturan) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam mengomunikasikan refleksi kekuasaan tersebut.

Kekuasaan memiliki keterkaitan yang komplit dengan berbagai variasi linguistik (*language*) yang dimunculkan ketika berbicara. Bahasa bukan hanya

penyampaian pesan (transaksi linguistik) tapi juga penyampaian suatu kuasa (*power*) (Karman, 2017). Untuk itu, bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk penyampaian dari suatu maksud keputusan (kekuasaan). Sehingga, penutur (pemimpin) dapat membuat mitra tutur (masyarakat) mempercayai bahkan melakukan tentang perihal yang diutarakannya (tuturan bahasa). Untuk itu, cara berbicara (pemilihan kata-kata), ketepatan situasi dan kondisi, serta latar belakang dari penutur (pemimpin) dapat merefleksikan kekuasaan dan status penutur serta memiliki pengaruh terhadap suatu penyampaian kekuasaan tersebut (lihat Fairclough, 2001, 2010). Serta, kekuasaan juga memiliki keterkaitan dengan ilmu pengetahuan yang kompleks dari unsur produktif dan tindakan, tetapi bukan suatu kepemilikan properti dan bersifat negatif (lihat Foucault, 1977, 1995).

Salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam kepemimpinan bagi masyarakatnya adalah Jepang. Jepang termasuk kedalam negara penganut sistem parlementer (lihat Keduataan Jepang, 2019). Sistem tersebut berupa sistem pemerintahan negara yang dikendalikan atau dijalankan oleh seorang perdana menteri, sementara raja atau kaisar hanya sebagai simbol negara. Sehingga, berdasarkan fungsi dalam menjalankan kenegaraan, perdana menteri dapat diasumsikan sebagai seorang presiden di negara-negara yang menggunakan sistem presidensial.

Salah satu politikus Jepang yang pernah menjabat dan memiliki pengaruh dalam menjalankan praktik kepemimpinan sebagai Perdana Menteri adalah Abe Shinzou. Abe Shinzou merupakan seorang politikus dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang menjabat terlalu lama sebagai Perdana Menteri dalam sejarah pemerintahan Jepang. Perdana Menteri Abe Shinzou sudah pernah menjabat dari

tahun 2006-2007 dan terpilih kembali pada tahun 2012-2020 (Naikakukanbou, 2020). Hal tersebut menandakan bahwa Abe Shinzou memiliki jiwa kepemimpinan (kekuasaan) yang dikagumi dan dipercaya oleh masyarakat Jepang, serta seorang visioner yang memiliki kebijakan-kebijakan pemerintahan tepat guna seperti pada saat terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Jepang.

Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia (Sugihantono & Dkk., 2019) menyatakan bahwa Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) merupakan suatu penyakit menular yang ditandai dengan infeksi atau gangguan sistem pernapasan bagi penderitanya bahkan menyebabkan kematian. Penyakit ini dimulai dari negara Wuhan-China dan menyebar ke negara-negara lain termasuk negara Jepang. Sehingga, kasus ini dijadikan sebagai pandemi serius yang melanda dunia dan menyebabkan krisis berbagai sektor seperti ekonomi, budaya-sosial, bahkan politik.

Pandemi Covid-19 tentu telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan suatu negara. Hal ini membuat berbagai kepala negara terkhususnya Perdana Menteri Jepang diharuskan mampu melakukan berbagai tindakan guna mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai seorang Perdana Menteri Jepang, Abe Shinzou akan mengumumkan kepada masyarakatnya melalui pidato konferensi pers (teks wacana) tentang perkembangan situasi di negara tersebut dan penyampaian strategi kebijakan yang akan diterapkan, baik berupa perintah, larangan, maupun perasaan psikologisnya. Hal ini dapat memperlihatkan/merefleksikan kekuasaan yang akan dimunculkan melalui tindak tuturnya.

Pidato pada saat konferensi pers ini berlangsung dalam masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang yang menyampaikan tentang perkembangan covid-19. Hal ini dilakukan dari bulan Februari hingga Mei 2020 sebelum Abe Shinzou mengundurkan diri pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan permasalahan kesehatannya.

Dengan demikian, seorang Perdana Menteri dalam penyampaian wacana tentu harus memiliki strategi bertutur yang baik, karena hal ini dapat memperlihatkan tingkat intelektualitas dan kepribadian serta bentuk kekuasaan yang dimiliki. Sehingga, berbagai spekulasi dari tuturan dapat mencerminkan maksud dan makna tentang perihal yang diutarakan/disampaikan. Namun, terkadang penafsiran maksud dan tujuan menimbulkan kesalahpahaman antara penutur (pemimpin) dan mitra tutur (masyarakat). Kesalahpahaman tersebut dapat diakibatkan oleh maksud maupun tujuan dari ide, pikiran, atau perasaan penutur (pemimpin) tidak tersampaikan dengan efektif.

Selain itu, terkadang penutur (pemimpin) juga tidak menyampaikan maksud tuturannya secara langsung, akan tetapi secara tersembunyi atau tersirat dibalik tuturannya tersebut. Sehingga dalam menginterpretasikan sebuah tuturan, mitra tutur (masyarakat) tidak hanya dapat menyimak kata-kata, namun diharuskan memperhatikan konteks, tujuan pembicaraan, situasi, bahkan peristiwa pada saat tuturan tersebut berlangsung.

Menurut ilmu pragmatik, tindak tutur terdiri dari suatu penyampaian dalam komunikasi secara literal (lokusi = tataran semantik) yang terdapat maksud tertentu (ilokusi = tataran pragmatik) guna mempengaruhi suatu objek/ memiliki pengaruh (perlokusi = hasil/maksud terpenuhi) sesuai yang diinginkan penutur.

Untuk itu, berdasarkan teori Searle (1976; 1979) tindak tutur ilokusi terdiri dari asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Sementara itu, wacana dapat dikaji dalam rangkaian tindak tutur seseorang yang menggunakan bahasa demi membangun peristiwa dalam suatu situasi yang dapat mengenali koherensi, referensi, implikatur, dan inferensi suatu wacana secara lebih mendalam (Suyitno, 2015). Sehingga, tindak tutur tersebut dapat digunakan sebagai analisis wacana dalam bahasa yang dapat menghasilkan refleksi bentuk kekuasaan di masyarakat melalui tuturan. Hal ini sebagai bentuk bahwa tindak tutur dalam wacana tidak hanya sebuah bahasa melainkan penghubungan dengan konteks yang dapat memperlihatkan bentuk kekuasaan.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Refleksi Kekuasaan dalam Tuturan Ilokusi Perdana Menteri Abe Shinzou tentang Pandemi Covid-19”.

1.2 Batasan Masalah

Pembahasan penelitian ini berfokus dalam ruang lingkup kajian Tindak Tutur (*Speech Act*) berupa Analisis Wacana (*Discourse Analysis*) (AW). Penulis membatasi kajian tentang analisis refleksi kekuasaan berdasarkan AW dari konsep ilokusi berupa bentuk tindak tutur ilokusi yang dimunculkan dalam pidato Perdana Menteri Jepang-Abe Shinzou tentang penanggulangan pandemi Covid-19. Sehingga pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Searle (1979) untuk mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi berupa Asertif, Direktif, Komisif, Ekspresif, dan Deklaratif. Serta, menganalisis data dengan menggunakan metode pendekatan Analisis Wacana (AW).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang penulis uraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk dominan (frekuensi dan persentase) tindak tutur Ilokusi dalam delapan transkrip pidato Perdana Menteri Abe Shinzou tentang pandemi Covid-19?
2. Bagaimana refleksi kekuasaan Perdana Menteri Jepang Abe Shinzou berdasarkan klasifikasi tindak tutur ilokusi Searle (1976; 1979) yang dimunculkan dalam delapan transkrip pidato tentang pandemi Covid-19?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian dapat berupa penemuan, pengembangan, atau pengujian kebenaran dari suatu pengetahuan secara empiris berdasarkan data dan fakta (Semi dalam Zaim, 2014). Selain itu, Siyoto & Sodik (2015) juga merumuskan bahwa penelitian bertujuan untuk eksplorasi, deskripsi, prediksi, eksplanasi, dan berupa aksi terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin penulis capai yaitu:

1. Menemukan dan menganalisis bentuk dominan berupa frekuensi dan persentase tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam transkrip pidato Perdana Menteri Jepang Abe Shinzou tentang pandemi Covid-19.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan refleksi kekuasaan berdasarkan klasifikasi tindak tutur ilokusi yang dimunculkan dalam transkrip pidato Perdana Menteri Jepang-Abe Shinzou tentang penanggulangan pandemi Covid-19.

Dengan demikian, tujuan ini dapat memberikan gambaran mengenai refleksi dari penggunaan kekuasaan seorang pemimpin pemerintahan (Perdana Menteri Jepang) dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam bentuk teoretis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu linguistik, khususnya kajian tindak tutur dan analisis wacana bahasa Jepang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang refleksi kekuasaan pemimpin yang dimunculkan melalui tuturan dalam pidato pemerintahan yang sedang menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan tindak tutur (*speech act*) dan analisis wacana.

b. Bagi Pembelajar Bahasa Jepang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai penggunaan tindak tutur ilokusi dan cara analisis wacana dalam menganalisis teks wacana bahasa Jepang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan atau referensi kajian yang relevan untuk peneliti selanjutnya.